



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

FOOD ESTATE DI ERA PRABOWO: SOLUSI SWASEMBADA ATAU ULANGI KESALAHAN LAMA?

Sri Nurhayati Qodriyatun

Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Rahmat Sawalman

Analisis Legislatif Ahli Pertama
rahmat.sawalman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Food estate (lumbung pangan) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kawasan produksi pangan skala besar sebagai solusi terhadap ketergantungan impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, di era pemerintahan Jokowi, program ini dinilai gagal mencapai target karena mengalami berbagai kendala, di antaranya banyak lahan terbengkalai, tingkat produksi yang rendah, dan tantangan ekologis seperti konversi lahan gambut yang kurang cocok untuk pertanian intensif. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian pada 5 November 2024 lalu, permasalahan ini menuai sorotan dalam pembahasan rencana program kerja prioritas Kementerian Pertanian tahun 2025. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mendukung secara konseptual program cetak sawah dalam *food estate* untuk swasembada pangan, namun ditekankan bahwa perlu pendekatan ilmiah dalam pemilihan lokasi dan penerapan teknologi agar kegagalan program ini tidak terulang kembali.

Di bawah pemerintahan Prabowo, Kementerian Pertanian melanjutkan dan memperluas program *food estate* dengan target meningkatkan produksi pangan nasional dan mencapai swasembada dalam 3-4 tahun ke depan. Presiden Prabowo menugaskan Kementerian Pertanian untuk mempercepat program cetak sawah seluas 3 juta hektare di Merauke, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, melaporkan bahwa program ini sudah dimulai di Merauke dan Kalimantan Tengah, dengan rencana ekspansi lebih lanjut ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Program *food estate* di Indonesia, khususnya di Merauke, difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan penerapan teknologi pertanian modern. Merauke telah diproyeksikan sebagai sentra pangan nasional untuk swasembada pangan sejak pemerintahan sebelumnya. Pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Merauke, di mana 35 ribu hektare telah ditanami dan sisanya masih dalam tahap pengolahan lahan. Sebagai langkah awal dalam proyek besar ini, pemerintah membangun *demonstration plot* (demplot) seluas 20 hektare di Distrik Wanam sebagai model produksi pertanian modern. Pertanian di kawasan ini akan menggunakan peralatan canggih seperti traktor, *rice transplanter*, dan pompa air. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah telah mendistribusikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 214 brigade pangan. Dengan penerapan teknologi pertanian modern, program *food estate* di Merauke diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga IP 300, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Langkah ini juga diiringi rencana pengembangan kawasan *food estate* di Pulau Nusakambangan, yang saat ini sedang dalam tahap kajian, sebagai upaya memperluas area produksi pangan dan memastikan ketahanan pangan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu langkah strategis lainnya yang dilakukan Presiden Prabowo yaitu mempercepat kerja sama dengan Singapura melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mencakup teknologi pertanian dan keamanan pangan pada 6 November 2024 lalu.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan keberhasilan program *food estate*, termasuk optimalisasi lahan, penerapan teknologi pertanian modern, dan penyediaan alat serta mesin pertanian. Meskipun demikian, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diselesaikan agar tidak terulang kegagalan seperti yang terjadi sebelumnya. Tantangan utama adalah kesiapan lahan, karena banyak area yang dialokasikan, terutama lahan gambut dan rawa, tidak cocok untuk pertanian intensif dan sering berakhir terbengkalai. Ada juga risiko kerusakan lingkungan, seperti degradasi ekosistem dan emisi karbon yang tinggi akibat konversi lahan. Keterbatasan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan akses transportasi di daerah terpencil seperti Merauke dan Kalimantan, juga menjadi kendala. Selain itu, kurangnya keterlibatan petani lokal dan dukungan insentif mempersulit keberlanjutan program ini. Untuk memastikan keberhasilan program *food estate*, diperlukan evaluasi yang komprehensif, pemberian pelatihan kepada petani, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan DPR agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.

Atensi DPR

Program *food estate* yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional perlu dijalankan dengan cermat agar kegagalan di masa lalu tidak terulang. Mengingat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya, DPR RI, khususnya Komisi IV, perlu mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi yang lebih terukur dan berkelanjutan. *Pertama*, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian lahan, terutama di area lahan gambut dan rawa, guna memastikan efektivitas pertanian intensif. *Kedua*, perlu untuk mengoptimalkan infrastruktur pertanian dan distribusinya ke daerah terpencil. *Ketiga*, perlu memperkuat kolaborasi dengan petani lokal melalui pelatihan teknis dan pemberian insentif agar mereka lebih berdaya dalam mendukung produksi pangan.

Sumber

bbc.com, 18 Oktober 2024;
cnbcindonesia.com, 2 dan 6 November 2024;
cnnindoensia.com, 7 November 2024;
detik.com, 2 November 2024;
kompas.com, 6 November 2024;
setkab.go.id, 3 November 2024; dan
tempo.co, 3 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024